

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN DAN ASET TETAP PERUSAHAAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN

Padri Achyarsyah¹, Dipa Teruna Awaloedin², Asyari Abbas³
Ignasia Panda Awa⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional
padri.achyarsyah@civitas.unas.ac.id dipateruna@civitas.unas.ac.id
asyari@civitas.unas.ac.id ignasiaawa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan aset tetap perusahaan terhadap laba perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini ada 27 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji signifikansi simultan (uji F), uji signifikansi parameter individual (uji t), dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan dan Aset Tetap Perusahaan. Secara parsial Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan dan Aset tetap Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Laba perusahaan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Aset tetap Perusahaan, Laba Perusahaan

ABSTRACT

The research objective was to examine the effect of tax planning, company size and company fixed assets on company profits in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. This research is a descriptive study with a quantitative approach. The sample used is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The number of companies sampled in this study were 27 companies with a purposive sampling method. While the data analysis method used is descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, simultaneous significance test (F test), individual parameter significance test (t test), and coefficient of determination. Based on the research results indicate that tax planning, company size and company fixed assets. Partially, tax planning affect company profits, company size affects company profits and company fixed assets does not affect company profits.

Keywords: Tax Planning, Company Size, Company Fixed Assets, Company Profits

PENDAHULUAN

Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Informasi tentang laba (*earnings*) mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam ekonomi perusahaan. Laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya, yaitu *stakeholders*. “Dengan mengetahui apa yang diinginkan *stakeholder* maka manajer dapat merumuskan suatu strategi bisnis yang fleksibel tidak hanya bisa mengakomodasi seluruh kepentingan *stakeholder*, tetapi juga tujuan akhir perusahaan”. Manajer sebagai pemimpin perusahaan akan memaksimalkan laba pada perusahaan dalam mencapai tujuannya, karena informasi yang terkandung dalam laba memiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor semakin tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut. Jumlah laba perusahaan merupakan informasi terpenting yang terdapat dalam laporan keuangan. Selain laporan arus kas, laporan laba rugi juga merupakan laporan keuangan yang terkait dengan prediksi arus kas di masa mendatang. Laporan laba rugi merupakan laporan utama mengenai kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi

memuat banyak angka laba, yaitu laba kotor, laba operasi, dan laba bersih.

Penyajian informasi laba melalui laporan keuangan merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting dibandingkan dengan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada gambaran meningkatnya dan menurunnya modal bersih.

Perencanaan pajak (*tax planning*) mengarah pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Peraturan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Ketentuan perpajakan terus mengikuti perubahan dan perkembangan perekonomian negara, masyarakat juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat lewat kebijakan fiskal pada semua lapisan masyarakat maupun semua bentuk kegiatan usaha.

Pemerintah Indonesia, seperti yang kita ketahui, menganut [sistem pemungutan pajak self assessment](#). Salah satu implementasinya adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan

Pajak Penghasilan (PPh) terutang sendiri. Diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008, diharapkan memberi keringanan beban pajak bagi perusahaan, “tetapi perusahaan tetap menganggap pajak menjadi sebuah beban “(Santana dan Wirakusuma, 2016). Pemerintah dalam tindakannya mengurangi praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan terkait pemungutan pajak, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Nomor 28 tahun 2007 dan dipertegas dengan peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 dimana pemerintah telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan. Salah satunya adalah merevisi undang-undang pajak penghasilan. Alasan pemerintah merevisi undang-undang perpajakan adalah untuk mengurangi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan penilaian kinerja keuangan perusahaan yang bisa dilihat dari jumlah asset laporan keuangan (Dewi, dkk, 2017). Menurut Prasetya (2016) ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Handayani, 2018). Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengungkapkan penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan memiliki jumlah asset yang besar pula. Maka dengan besarnya jumlah

asset tersebut akan menimbulkan beban yang besar pula, dimana beban tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pada umumnya nilai ekonomis suatu aktiva tetap akan mengalami penurunan yang disebabkan pemakaian, kerusakan, dan ketinggalan zaman karena faktor ekonomis dan faktor teknis, maka aktiva ini memerlukan pengelolaan kebijakan yang khusus, baik dalam penggunaan, pemeliharaan, penguasaan maupun pencatatan, akuntansinya dan mempengaruhi peranan penting dalam aktivitas produksinya. Berjalannya waktu nilai suatu aktiva tetap harus dapat disusutkan atau dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode penyusutan.

Penyusutan didefinisikan sebagai suatu proses akuntansi dalam mengalokasi biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Ada pula faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan, faktor tersebut adalah nilai aktiva tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan (dasar penyusutan) dan taksiran manfaat. Dasar penyusutan dapat berupa (a) Harga perolehan atau (b) Nilai buku. Metode penyusutan yang tepat dan benar harus dilakukan perusahaan agar biaya penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aktiva tetap pada neraca.

Salah satu kasus laba yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada

perusahaan PT. Inovisi Infracom pada tahun 2015. Kasus pada perusahaan ini bermula ketika Bursa Efek Indonesia menemukan indikasi adanya manipulasi laba. Indikasi manajemen laba ini muncul ketika dirasa laporan keuangan yang diterbitkan tidak sesuai dan mengalami banyak kesalahan. Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Kesalahan yang mencolok terutama pada bagian penerimaan, bagian pembayaran kas pada karyawan. Bursa Efek Indonesia juga mempertanyakan adanya perubahan angka terhadap pembayaran kas kepada karyawan, yang mana pada laporan keuangannya tidak memunculkan penjelasan adanya perubahan. Pembayaran kas kepada karyawan yang sebelumnya bernilai Rp1,9 triliun pada kuartal ketiga tahun 2014 mengalami angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp59 miliar. Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun, setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Fenomena yang terkait dengan laba yang lain terjadi pada PT. Waskita Karya, Tbk. Perusahaan ini berencana akan membangun jalan tol atas laut di Kalimantan. Kasus ini terjadi pada penghujung tahun 2009. PT. Waskita Karya, Tbk menjadi sorotan karena kasus manipulasi laporan keuangan. Perusahaan mengalami defisit akibat kelebihan pencatatan laporan keuangan, PT. Waskita Karya seharusnya mencatat rugi namun dalam laporannya malah terlihat untung. Oknum direksi Waskita Karya yang diketahui memalsukan laporan keuangan perseroan, sudah di non-aktifkan oleh kementerian BUMN, sebagai pemilik saham. Rekayasa laporan keuangan BUMN bidang jasa konstruksi ini hanya bersifat administratif oknum direksi yang terlibat, diakui Sofyan sebagai menteri BUMN tidak secara sengaja memalsukan laporan keuangan demi kepentingan diri sendiri. Kondisi perusahaan yang sulit menyebabkan mereka mencari jalan dengan memalsukan laporan keuangan. Pemalsuan laporan keuangan perusahaan ini terdeteksi sejak Agustus 2009 dan menyebabkan Waskita mengalami defisit modal sebesar Rp 457 miliar. Setelah kejadian itu pemerintah memutuskan Waskita untuk direstrukturasasi dengan suntikan dana oleh PT. Perusahaan Pengelola Asset (PPA) sebesar Rp 400 miliar (Hernawati, 2016).

Fenomena lainnya yaitu kasus Garuda Indonesia yang dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), juga

dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. 2 April 2019 Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu, atau setara Rp11,33 miliar. (Asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. 30 April 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional).

Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. 2 Mei

2019 OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 8 Mei 2019 Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar dinilai berani menandatangani kerja sama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerja sama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan.

Pada tahun 2019 Kemenkeu Temukan Dugaan Laporan Keuangan Garuda Tak Sesuai Standar Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIAA yang menuai polemik. Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Akhirnya pada

tanggal 28 Juni 2019 Garuda Indonesia mendapatkan Sanksi dari OJK. Kemenkeu dan BEI Setelah perjalanan panjang, Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta. Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK. Yakni, Garuda Indonesia harus membayar Rp100 juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar Rp250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu.

Dengan uraian diatas *tax planning* merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitik beratkan pada

peningkatan laba. Oleh karena itu, terkait dengan topik yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai *Tax Planning* diperkirakan dapat meningkatkan optimalisasi pembayaran pajak penghasilan dan dapat mempengaruhi perencanaan perpajakan terhadap laba Perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang Berkaitan dengan Penelitian

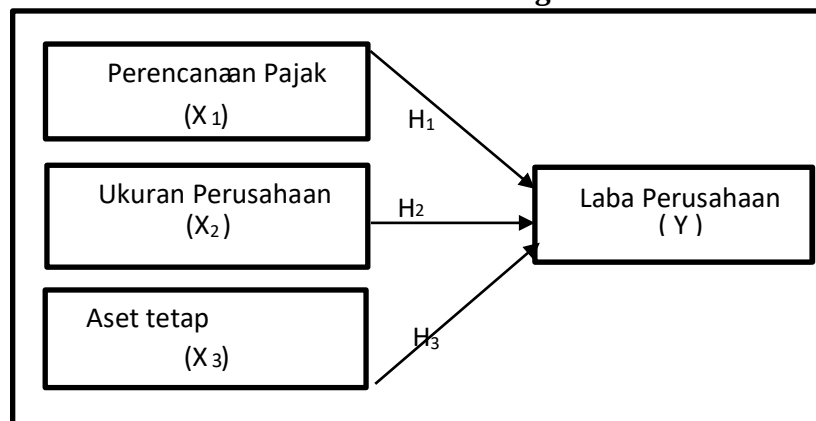
Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan
- H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan
- H₃ : Aset Tetap Perusahaan berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan

Kerangka Pemikiran

Gambat 1 Kerangla Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam Penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data di peroleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. www.idx.co.id

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 1 Definisi Operasional

Variable	Defenisi Operasional	Skala Pengukuran
Laba Perusahaan (Y)	Laba (profit) pada dasarnya merupakan pendapatan perusahaan, yaitu hasil penjualan (penerimaan) dikurangi semua biaya. Dengan demikian laba didefenisikan sebagai selisih dari hasil penjualan dan seluruh biaya produksi.	Berdasarkan laporan laba rugi pada laporan keuangan pada Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2015-2019.
PerencanaanP	<i>Tax planning</i> adalah suatu	Perencanaan pajak diukur dengan

ajak (<i>Tax Planning</i>) (X_1)	kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.	menggunakan rumus <i>tax retention rate</i> (tingkat retensi pajak) yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. $TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ income\ (EBIT)_{it}}$
Ukuran Perusahaan (X_2)	Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.	Size = Ln(Total Aset) Ln : Logaritma natural dari total aset
Aset Tetap Perusahaan (X_3)	Aset Tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang.	Dapat dikur menggunakan metode Penyusutan Garis Lurus. Penyusutan = $\frac{Biaya\ Perolehan - Nilai\ Residu}{Umur\ Ekonomis}$

Sumber : Data diolah oleh penulis 2020

Metode Analisis

1) Statistik deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data penelitian.

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian terbebas dari penyimpangan, dengan demikian, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik antara lain, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a) Uji Normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas

tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai eror (ϵ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

b) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi

dapat digunakan besaran Durbin-Waston)

c) Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*.

a) Uji Heteroskedastisitas

Uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear.

Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan bila peneliti bermaksud mengukur kekuatan dua variabel, bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan,

dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui kolerasi dari kedua variabel yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

a) Uji Statistik t (Uji Hipotesis Secara Simultan)

Uji statistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan langkah membandingkan dari F (hitung) dengan F (table). Nilai F (hitung) dapat dilihat dari hasil pengolahan data bagian ANOVA.

b) Uji Statistik t (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji Signifikasi t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Tingkat probability atau signifikasinya sebesar 5% atau

0,05. Jika $<$ dari 0,05 berpengaruh artinya hipotesis di terima. Jika $>$ dari 0.05 tidak berpengaruh artinya hipotesis di tolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Penelitian
Hasil Uji Statistik Deskripti

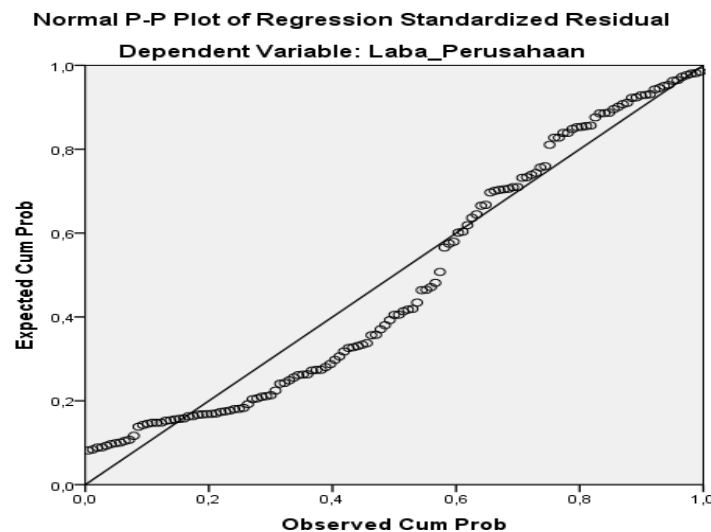
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak X1	135	814,0	18806,0	11104,222	3224,8847
Ukuran Perusahaan X2	135	49709	96537796	28041344,19	27103232,86
Aset Tetap Perusahaan X3	135	104584	2415421	400945,37	384731,601
Laba Perusahaan Y	135	54795925	240008588100	1679057355,00	34923383060,00
Valid N (listwise)	135				

Sumber: hasil output SPSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a) perencanaan pajak dengan jumlah pengamatan peneliti sebanyak 27 perusahaan selama 5 tahun pengamatan. Perencanaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 814,0 Nilai maksimum perencanaan pajak sebesar 18806,0 sedangkan nilai rata-rata perencanaan pajak sebesar 11104,222 dan standar deviasinya sebesar 3224,8847. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai data merupakan representasi yang baik atas keseluruhan data, karena nilai rata-rata data relatif lebih besar dari standar deviasinya. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.
- b) Ukuran Perusahaan dengan jumlah pengamatan sebanyak 27 perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 49709 serta nilai maksimum sebesar 96537796 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 28041344,19 dan nilai standar deviasi sebesar 27103232,86. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik atas keseluruhan data, karena nilai rata-rata data lebih besar dari standar deviasinya. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.
- c) Aset tetap perusahaan dengan jumlah pengamatan sebanyak 27 perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 104584 serta nilai maksimum sebesar 2415421 sedangkan nilai rata-rata Aset tetap perusahaan sebesar 400945,37 dan nilai standar deviasi aset tetap perusahaan sebesar 384731,601 Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik atas keseluruhan data, karena nilai rata-rata data lebih besar dari standar deviasinya. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adaah pencerminan penyimpangan, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber: hasil output SPSS

Dari gambar 2 grafik normalitas *p-plot of regression* menunjukkan

bahwa plot data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3
Tabel Uji F Simultan
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1912734344000,000	3	6375781147197719000	5,788	,001 ^b
	Residual	1443047762000,000	131	1101563177428554500		
	Total	1634321197000,000	134			

Dependent Variable: Laba Perusahaan

Predictors: (Constant), Aset Tetap Perusahaan, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan

Hasil pengolahan data pada tabel 3, dapat dilihat nilai sig 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat yang diujikan. Sehingga model penelitian fit dan layak digunakan untuk memperdiksi pengaruh perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan aset tetap perusahaan terhadap laba perusahaan

Pembahasan

1. Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dapat diketahui bahwa tabel variabel perencanaan pajak yang diukur dengan tingkat retensi pajak (TRR) memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan maka, dapat memangkas besarnya laba kena pajak dan dapat menekan pajak serendah mungkin tetapi dalam bingkai peraturan Pemerintah. Dan bukan untuk menghindari penurunan laba (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Salah satu tujuan

pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan.

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap laba perusahaan

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dapat diketahui bahwa tabel variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan Size memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05 Artinya Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan ukuran perusahaan semakin besar juga total aset nya yg akan di jadikan laba pada perusahaan.

3. Aset Tetap Perusahaan tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dapat diketahui bahwa tabel variabel aset tetap perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,894 yang berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga aset tetap perusahaan tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian, investasi aktiva tetap akan dapat berjalan dengan baik apabila setiap kerusakan yang terjadi dapat segera ditangani dan habisnya masa pakai dari suatu aktiva tetap harus dapat di pantau agar dapat stabil. Apabila investasi dalam aktiva tetap melebihi yang diperlukan akan membebankan *fixed cost* yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil akan dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya saing perusahaan atau kemungkinan lain perusahaan dapat kehilangan sebagian dari pasar produksinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan maka, dapat memangkas besarnya laba kena pajak dan dapat menekan pajak serendah mungkin tetapi dalam mengikuti peraturan Pemerintah.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Laba Perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar juga total aset yg akan di jadikan barang investasi untuk memperoleh laba pada perusahaan.

3. Aset Tetap Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Laba Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi aktiva tetap akan dapat berjalan dengan baik apabila setiap kerusakan yang terjadi dapat segera ditangani dan habisnya masa pakai dari suatu aktiva tetap harus dapat di pantau agar dapat stabil.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas daerah populasi tidak hanya pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi dan industri. Misalnya pada keseluruhan sub sektor yang tergabung dalam perusahaan manufaktur, dan menambah variabel-variabel penelitian agar hasilnya dapat lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Terjemahan

- Harrison, T. Walter & Charles T. Horngren. (2011). *Akuntansi Keuangan*. Edisi Kedelapan, Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama

- Alim, Rum Moch. (2011). *Dasar Dasar Teori Ekonomi Mikro Ekonomi*. Cetakan Pertama, Jakarta: IHC.
- Abiodun, B. (2013). The Effect of Firm Size on Firms Profitability in Nigeria. *Economics and Sustainable Development*.
- Brotodihadjo, Santoso. R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jurnal**
- Fatchan, Achyani & Susi Lestari. (2015). Pengaruh Perencanaan Laba terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>.
- Handoko, Jesica. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba pada Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Bisnis*, Vol 1, No 4.
- Nila, Trisna Syanthi. (2012). Dampak Manajemen Laba terhadap Perencanaan Pajak dan Presentasi Laba. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 80/DIKTI/Kep/2012.
- Nirawan, Adiasa. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Prefensi Resiko. *Jurnal Analisis Akuntansi*, Vol 2, No 3.
- Putra, Mahardika Indra. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Padang: Guadrant.
- Setiyadi. (2007). Pengaruh Company Siza, Profitability dan Institutional Ownership terhadap CSR Disclousure. *Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung*.
- Sule, Trisnawati Ernita & Kurniawan Saefullah. (2012). *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tinagon, S. M. (2014). Analisi Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Implementasinya. *Analisis Penerapan Metode Penyusutan*, ISSN 2303-1174.